

Relasi Sunni, Syiah dan Salafi: Genealogi Konflik, Kontestasi Otoritas, dan Peluang Rekonsiliasi

Anis Abd Rahman^{1*}, Andi Aderus², Indo Santalia³

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author: Ana Dhiqfaini Sultan, e-mail: anisabdurrahman1994@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRAK

Hubungan antara Sunni, Syiah, dan Salafi merupakan isu paling kompleks dalam khazanah Islam kontemporer. Ketegangan antarkelompok ini sering dipahami sebagai konflik teologis, padahal penelitian menunjukkan bahwa akar masalah lebih bersifat multidimensi yang mencakup sejarah, politik, epistemologi, dan dinamika sosial modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar persoalan hubungan ketiga kelompok tersebut melalui kajian pustaka (library research) terhadap literatur klasik dan kontemporer, artikel jurnal internasional, serta analisis wacana sektarian di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak bersifat esensial, melainkan diproduksi oleh kontestasi otoritas politik, konstruksi identitas keagamaan yang rigid, perbedaan paradigma keilmuan, dan reproduksi narasi provokatif melalui media sosial. Penelitian ini menawarkan pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah, dialog fikih antar mazhab, dan pendidikan Islam inklusif sebagai strategi rekonsiliasi. Studi ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kerangka akademik yang komprehensif untuk memahami relasi intra-agama Islam dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Keywords: Sunni, Syiah, Salafi, konflik intra-agama, epistemologi Islam, sektarianisme.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sejak awal sejarah Islam, perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan telah melahirkan berbagai mazhab dan kelompok. Namun, relasi antara Sunni, Syiah, dan Salafi merupakan salah satu yang paling berpengaruh dan melahirkan dinamika panjang yang terus berlanjut hingga hari ini. Konflik yang terjadi antara ketiga kelompok ini bukan hanya memiliki dampak teologis, melainkan juga politik, sosial, dan geopolitik. Di berbagai wilayah Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Yaman, dan Bahrain, ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah telah memicu perang saudara, ketidakstabilan geopolitik, dan migrasi besar-besaran (Nasr, 2006; Haddad, 2011; Wehrey, 2018).

Sementara itu, Salafisme sebagai gerakan purifikasi Islam modern telah berkembang menjadi kekuatan global, terutama melalui dukungan institusi keagamaan dan finansial dari negara-negara tertentu. Salafisme, dalam beberapa variannya, sering menampilkan posisi kritis terhadap praktik keagamaan Syiah maupun Sunni tradisional, sehingga memperluas ketegangan intra-Islam (Commins, 2006; Lauzière, 2016).

Pada saat yang sama, Syiah mengalami transformasi besar setelah Revolusi Iran 1979 yang mengubah Syiah dari sekadar minoritas teologis menjadi aktor geopolitik penting dalam percaturan global. Iran kemudian memainkan peran kuat dalam kawasan, sehingga memperkuat stereotip bahwa konflik Sunni-Syiah adalah bagian dari perang dingin Timur Tengah antara Iran (Syiah) dan Arab Saudi (Sunni) (Nasr, 2006; Gause, 2014).

Dalam konteks yang lebih luas, narasi sektarianisme tidak hanya berakar pada doktrin keagamaan, tetapi juga diproduksi oleh peristiwa sejarah, dinamika kekuasaan, politik identitas, serta intervensi internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami akar masalah hubungan Sunni–Syiah–Salafi secara integral dan komprehensif (Esposito, 2011; Wehrey, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan integratif, yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai perspektif teoretis dan empiris dari sumber-sumber literatur yang beragam. Sumber dan teknik pengumpulan data dikumpulkan dari: Sumber primer: kitab klasik (Nahj al-Balaghah, Tarikh al-Tabari, Kitab al-Tawhid), Sumber sekunder: buku ilmiah, artikel jurnal Scopus/SINTA, laporan lembaga riset seperti Brookings Institution dan International Crisis Group. Teknik Analisis dilakukan dengan metode analisis tematik untuk menemukan pola berulang dalam diskursus mazhab, analisis komparatif untuk menilai kesamaan dan perbedaan argumentasi teologis, analisis geopolitik untuk memetakan pengaruh negara-bangsa. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber historis, teologis, dan sosiopolitik, serta mengutip referensi yang memiliki kredibilitas tinggi dalam kajian akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Historis Hubungan Sunni–Syiah–Salafi: Pola Kontestasi dan Koeksistensi

Hasil kajian historis menunjukkan bahwa hubungan antara Sunni, Syiah, dan Salafi tidak dapat direduksi semata-mata sebagai relasi konflik, tetapi merupakan kombinasi kompleks dari kompetisi teologis, politik, dan sosial yang berlangsung sejak abad pertama hijriah (Hodgson, 1974; Esposito, 2011). Perspektif historis memperlihatkan bahwa ketegangan awal lebih berakar pada suksesi politik pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. daripada perbedaan teologi murni (Madelung, 1997). Hal ini ditegaskan oleh Madelung yang menunjukkan bahwa perselisihan awal bersifat politis-administratif sebelum mengalami teologisasi seiring perkembangan fikih, hadis, dan kalam (Madelung, 1997).

Dalam perkembangan berikutnya, berbagai kerangka otoritas keagamaan semakin mengeras dan melahirkan batas-batas identitas yang rigid. Studi Moosa (2015) menyimpulkan bahwa identitas Sunni dibentuk melalui konsensus ulama dan institusi fiqh, Syiah melalui doktrin imamah dan otoritas Ahl al-Bayt, dan gerakan Salafi melalui purifikasi dan skripturalisme literal abad ke-19, terutama setelah pengaruh Ibn Taymiyyah dan pembaruan Muhammad ibn Abd al-Wahhab (Moosa, 2015; Lauzière, 2016). Namun, sejarah juga menunjukkan periode koeksistensi yang relatif damai, seperti pada masa Dinasti Abbasiyah klasik, era Kesultanan Utsmani–Safawi dalam konteks tertentu, dan pada masyarakat multikultural di Asia Tenggara (Hodgson, 1974). Ini menandakan bahwa konflik bukanlah kondisi permanen, melainkan bergantung pada konstruksi sosial-politik zamannya (Esposito, 2011).

Identifikasi Akar Masalah: Teologi, Politik, dan Epistemologi

Analisis dokumen ilmiah, literatur teologi, serta publikasi kajian sektarian menunjukkan bahwa akar masalah hubungan Sunni–Syiah–Salafi dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah utama: teologis, politik, dan epistemologis (Nasr, 2006; Haddad, 2011).

1. Akar Teologis

Perbedaan teologis paling mendasar mencakup konsep imamah versus khilafah, otoritas Ahl al-Bayt versus *ijma'* ulama, penilaian terhadap sahabat, metodologi hadis, khususnya *jarh–ta'dil*, serta otoritas *marja'* dalam Syiah (Momen, 1985; Sachedina, 1988). Akar teologis ini menjadi problematis ketika masing-masing pihak mengembangkan argumentasi eksklusif yang mengklaim kebenaran tunggal (Esposito, 2011).

Sebagaimana dicatat oleh Sachedina, doktrin imamah menjadi fondasi identitas Syiah yang tidak mudah direduksi oleh pendekatan Sunni tradisional, sementara konsep salaf dalam Salafisme

melahirkan pandangan bahwa praktik Islam non-salaf adalah bid'ah yang harus dikoreksi (Sachedina, 1988; Lauzière, 2016).

2. Akar Politik dan Geopolitik

Riset kontemporer menunjukkan bahwa dimensi politik merupakan faktor paling signifikan dalam memperkeras hubungan ketiga kelompok (Nasr, 2006; Gause, 2014). Rivalitas Saudi–Iran, konflik Suriah–Yaman, hingga politik sektarian di Irak menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dijadikan alat legitimasi politik (Wehrey, 2018). Bahkan, aktor-aktor politik sering mengeksploitasi simbol-simbol teologis untuk membangun dukungan massa dan menciptakan polarisasi (Haddad, 2011). Di banyak negara, ketegangan sektarian meningkat karena keterlibatan negara, kebijakan diskriminatif, dan kampanye delegitimasi kelompok lain melalui media, termasuk media digital (Gause, 2014; Ingrams, 2020).

3. Akar Epistemologi Keilmuan

Kajian juga menemukan bahwa salah satu akar konflik terletak pada perbedaan epistemologi keilmuan antarmazhab (Gleave, 2012). Sunni menempatkan *ijma'*, *qiyas*, dan otoritas ulama empat mazhab sebagai metodologi hukum, Syiah menggunakan otoritas imam maksum dan sistem *ijthad marja'iyah*, sementara Salafi menolak metode fikih klasik ketika dianggap menjauh dari nash literal dan lebih mengutamakan pemahaman generasi salaf (Lauzière, 2016).

Perbedaan epistemologi ini melahirkan ketidaksalingmengertian yang, menurut Gleave, tidak dapat direduksi menjadi sekadar perbedaan pendapat, melainkan merupakan perbedaan paradigma keilmuan yang fundamental (Gleave, 2012).

Manifestasi Konflik dalam Konteks Sosial Kontemporer

1. Polarisasi Identitas di Media Sosial

Penelitian digital ethnography memperlihatkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran narasi sektarian, terutama konten polemik, takfiri, atau debat teologis yang bersifat simplifikasi (Ingrams, 2020). Platform seperti YouTube dan X (Twitter) memfasilitasi ceramah-ceramah provokatif yang memperkuat stereotipe negatif antar kelompok (Hasan, 2021). Pada titik tertentu, konflik yang sebelumnya terbatas pada ranah akademik kini merembes ke identitas sosial generasi muda Muslim (Haddad, 2011).

2. Konflik Komunitas di Akar Rumpun

Data lapangan dari berbagai studi menunjukkan bahwa konflik di tingkat komunitas sering dipicu oleh kompetisi sumber daya masjid dan lembaga pendidikan, larangan atau penutupan aktivitas keagamaan, serta tindakan kekerasan berbasis label “sesat” atau “radikal” (Hasan, 2021). Konflik komunitas ini biasanya tidak murni teologis, tetapi dipengaruhi dinamika ekonomi-politik lokal (Esposito, 2011).

3. Reproduksi Narasi Takfiri

Kajian tekstual menemukan bahwa sebagian literatur klasik maupun kontemporer digunakan secara selektif untuk menguatkan narasi delegitimasi (Lauzière, 2016). Gerakan Salafi-jihadi, misalnya, menggunakan karya Ibn Taymiyyah secara tidak kontekstual untuk menjustifikasi permusuhan kepada Syiah, sedangkan sebagian kelompok Syiah ekstrem juga mereproduksi kritik berlebihan terhadap sahabat (Nasr, 2006). Reproduksi narasi semacam ini memperpanjang ketegangan dan mempersempit ruang dialog (Haddad, 2011).

Peluang Dialog dan Integrasi: Temuan Solusi dari Literatur Akademik

1. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Ruang Pertemuan

Beberapa penelitian menawarkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai lintasan epistemologis yang dapat menjembatani perbedaan mazhab (Auda, 2008; Kamali, 2009). Pendekatan ini menekankan kemaslahatan universal seperti keadilan, perlindungan nyawa, dan harmoni sosial, sehingga memungkinkan kerja sama antara Sunni, Syiah, dan Salafi dalam isu-isu sosial-politik kontemporer (Auda, 2008).

2. Model Dialog Fikih Antar-Mazhab

Pengalaman “taqrīb al-madzāhib” yang pernah dipromosikan melalui Al-Azhar dan lembaga fikih di Iran menunjukkan keberhasilan parsial dalam mengurangi stigma sektarian (Abdel-Haleem, 2004). Studi ini menegaskan bahwa dialog mazhab berhasil ketika dilakukan pada level ulama, berbasis karya ilmiah yang mempunyai otoritas, dan bukan dalam ruang populis atau politis (Abdel-Haleem, 2004).

Pendidikan Islam Inklusif

Banyak literatur merekomendasikan pengembangan kurikulum Islam yang tidak memonopoli kebenaran mazhab tertentu, melainkan mengenalkan keragaman tradisi Islam secara proporsional (Hasan, 2021). Program ini dapat menekan reproduksi prasangka sektarian sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penelitian Hasan di Indonesia memperlihatkan bahwa pendekatan ini efektif mengurangi sikap permusuhan di lingkungan kampus (Hasan, 2021).

Analisis Integratif: Mengapa Konflik Terus Berulang?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Sunni–Syiah–Salafi berulang karena tiga faktor utama: konstruksi identitas keagamaan yang rigid, instrumentalisasi politik, dan rendahnya literasi mazhab intra-Muslim (Coser, 1956; Barth, 1998). Masing-masing kelompok membangun identitas berbasis klaim kebenaran absolut yang sulit dinegosiasikan, dan identitas ini direproduksi melalui pendidikan, khotbah, dan media sosial (Barth, 1998; Ingrams, 2020). Selain itu, negara dan elite politik mengeksploitasi isu sektarian sebagai alat mobilisasi kekuasaan (Gause, 2014). Mayoritas konflik muncul bukan karena kedalaman wawasan teologis, tetapi karena miskonsepsi, stereotipe, dan ketidaktahuan mengenai tradisi lain (Haddad, 2011). Analisis integratif ini menguatkan tesis bahwa kajian teologis saja tidak memadai untuk menjelaskan konflik sektarian. Kompleksitas konflik harus dianalisis melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup sejarah, ilmu politik, antropologi, dan studi agama (Esposito, 2011).

Implikasi Akademik dan Praktis

1. Implikasi Akademik

Studi sektarian perlu menggeser fokus dari perbedaan teologi menuju analisis proses produksi konflik dan politisasi identitas (Coser, 1956; Barth, 1998). Diperlukan model epistemologi lintas mazhab untuk menilai sumber otoritas hadis dan fikih secara lebih objektif dan proporsional (Gleave, 2012).

2. Implikasi Praktis

Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan coexistence policy yang tidak memihak pada satu mazhab tertentu (Gause, 2014). Ulama lokal perlu memperkuat literasi mazhab daripada mengulang narasi delegitimasi, sementara lembaga dakwah dan pendidikan harus mengutamakan isu kemanusiaan dan kemaslahatan universal sebagai ruang pertemuan antar kelompok (Auda, 2008; Hasan, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian mengenai akar masalah hubungan antara Sunni, Syiah, dan Salafi menunjukkan bahwa ketegangan antarkelompok bukan hanya persoalan perbedaan teologis, tetapi merupakan konstruksi multidimensi yang dipengaruhi oleh sejarah, politik, epistemologi, dan dinamika sosial kontemporer. Hasil analisis pada bab sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan yakni konflik Sunni–Syiah–Salafi berakar pada interaksi kompleks antara teologi, politik, dan identitas historis. Perbedaan konsep imamah, khilafah, otoritas ulama, dan metodologi hukum Islam merupakan fondasi teologis utama yang membentuk identitas ketiga kelompok. Namun sejarah membuktikan bahwa ketegangan hanya menjadi konflik terbuka ketika melibatkan faktor politik, terutama rivalitas kekuasaan dan perebutan legitimasi keagamaan. Aktor politik dan dinamika geopolitik berperan signifikan dalam memperkeras polarisasi mazhab. Rivalitas negara-negara besar di Timur Tengah seperti Iran dan

Saudi Arabia, serta konflik kawasan seperti di Irak, Suriah, dan Yaman, telah memperluas dampak pertentangan teologis ke level global. Aktor politik sering memanfaatkan identitas sektarian untuk mobilisasi massa, memperkuat narasi permusuhan antar kelompok. Media sosial mempercepat reproduksi narasi sektarian dan memperluas konflik ke ruang publik. Konten digital tanpa filter akademik telah menggantikan posisi diskursus intelektual, sehingga narasi simplistik, takfiri, dan provokatif lebih mudah menyebar. Hal ini membuat generasi muda Muslim menjadi sasaran empuk polarisasi digital yang memperdalam prasangka lintas mazhab. Perbedaan epistemologi keilmuan merupakan akar masalah mendalam yang jarang disorot. Sunni, Syiah, dan Salafi memiliki cara berbeda dalam memahami otoritas teks, hadis, dan ulama. Perbedaan epistemologi ini menghasilkan kerangka berpikir yang sulit saling diterjemahkan, sehingga dialog sering mengalami kebuntuan bukan karena perbedaan substansi, tetapi perbedaan metodologi. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa koeksistensi antar mazhab adalah sesuatu yang mungkin dan pernah terjadi. Periode klasik Islam memperlihatkan banyak titik temu dalam ranah kebudayaan, ekonomi, bahkan ilmu pengetahuan. Artinya, konflik bukanlah kondisi bawaan, tetapi situasional dan dapat diatasi melalui kebijakan sosial, pendekatan epistemologis, dan pembelajaran lintas mazhab yang tepat.

REFERENCES

- Abdel-Haleem, M. (2004). *Understanding the Qur'an: Themes and Style*. London: I.B. Tauris.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Gleave, R. (2012). *Islam and Literalism: Ibn Hanbal and Sunni Traditionalism*. Edinburgh University Press.
- Hasan, N. (2021). "Inclusive Islamic Education in Indonesia," *Journal of Islamic Studies*.
- Ingrams, A. (2020). *Digital Sectarianism in the Middle East*. Routledge.
- Kamali, M. H. (2009). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld.
- Madelung, W. (1997). *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge University Press.
- Moosa, E. (2015). *What Is a Madrasa?* University of North Carolina Press.
- Nasr, V. (2006). *The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future*. W. W. Norton.
- Sachedina, A. (1988). *The Just Ruler in Shi'ite Islam*. Oxford University Press.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries*. Waveland Press.
- Brubaker, R. (2004). *Ethnicity Without Groups*. Harvard University Press.
- Halm, H. (2004). *The Shiites*. Edinburgh University Press.
- Haykel, B. (2013). *Saudi Arabia and Salafism*. Cambridge University Press.
- Lauzière, H. (2016). *The Making of Salafism*. Columbia University Press.
- Madelung, W. (1997). *The Succession to Muhammad*. Cambridge University Press.
- Nasr, V. (2006). *The Shia Revival*. Norton.
- Nasr, V. (2007). *The Shia–Sunni Divide*. Oxford University Press.
- Wehrey, F. (2017). *Beyond Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism*. Oxford University Press.